



LAUT CINA SELATAN:

JALUR DAGANG, SENGKETA KEDAULATAN, DAN POLITIK KESEIMBANGAN

Oleh
Rudy C Tarumingkeng

Sebuah kajian tentang dinamika geopolitik, kepentingan strategis, dan upaya mencari keseimbangan di jantung perdagangan global.



JALUR DAGANG
GLOBAL



SENGKETA
KEDAULATAN



HUKUM
INTERNASIONAL



POLITIK
KESEIMBANGAN

Rudy C Tarumingkeng: **Laut Cina Selatan: Jalur Dagang, Sengketa
Kedaulatan, dan Politik Keseimbangan**

Oleh:

[Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD](#)

Professor of Management NUP: 9903252922

Professor Emeritus, IPB-University

Rector, Universitas Cenderawasih, Papua (1978-1988, dan

Rector, Kampus AGRO Manokwari sekarang Universitas Papua Manokwari

Coordinator, CIDA/DIKTI SFU Burnaby BC Canada 1988-1991

Rector, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta (1991-2000)

Chairman, Board of Professors, IPB-University, Bogor (2005-2006)

AI - Data Analyst, dan Chairman, Academic Senate, IBM-ASMI, Jakarta 2024-

© RudyCT Academic Series

rudict75@gmail.com

4 April 2026

LAUT CINA SELATAN: JALUR DAGANG, SENGKETA KEDAULATAN, DAN POLITIK KESEIMBANGAN

Abstrak

Laut Cina Selatan merupakan salah satu ruang strategis paling penting dalam geopolitik kontemporer. Kawasan ini menghubungkan Samudra Hindia dan Pasifik, menjadi jalur vital perdagangan maritim, energi, perikanan, dan rantai pasok industri Asia Timur. Di saat yang sama, kawasan ini juga menjadi arena sengketa kedaulatan dan yurisdiksi maritim yang melibatkan China, Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei, Taiwan, dan dalam konteks tertentu Indonesia melalui isu Zona Ekonomi Eksklusif di sekitar Natuna Utara. Makalah ini membahas tiga dimensi utama: pertama, arti geoekonomi Laut Cina Selatan sebagai jalur dagang global; kedua, dasar historis, hukum, dan politik dari sengketa yang berlangsung; dan ketiga, dinamika politik keseimbangan yang melibatkan negara-negara ASEAN, kekuatan besar, serta aktor ekstra-regional. Argumen utama makalah ini ialah bahwa Laut Cina Selatan bukan hanya konflik teritorial biasa, melainkan simpul tempat hukum laut, nasionalisme, keamanan energi, strategi militer, dan diplomasi regional saling bertemu. Karena itu, stabilitas kawasan tidak cukup dijaga hanya dengan deterensi militer atau

negosiasi bilateral, tetapi memerlukan kombinasi supremasi hukum internasional, penguatan sentralitas ASEAN, mekanisme pencegahan insiden, dan politik keseimbangan yang berhati-hati agar kompetisi tidak berubah menjadi konflik terbuka. ([U.S. Energy Information Administration](#))

Kata kunci: *Laut Cina Selatan, UNCLOS, ASEAN, jalur dagang, sengketa kedaulatan, politik keseimbangan, Indo-Pasifik, keamanan maritim*

Laut Cina Selatan: Jalur Dagang, Sengketa Kedaulatan, dan Politik Keseimbangan

Pendahuluan

Laut Cina Selatan telah berubah dari sekadar ruang perairan regional menjadi salah satu pusat gravitasi geopolitik dunia. Di sinilah jalur pelayaran internasional, pasokan energi, klaim sejarah, hukum laut, dan persaingan kekuatan besar bertemu secara langsung. Dalam perspektif hubungan internasional, Laut Cina Selatan adalah contoh nyata bahwa wilayah maritim bukan hanya masalah geografi, tetapi juga soal akses ekonomi, legitimasi hukum, identitas nasional, dan strategi pertahanan. Ketika insiden di laut meningkat, maknanya tidak berhenti pada benturan kapal penjaga pantai, melainkan merambat ke harga energi, premi asuransi maritim, persepsi risiko investor, dan kepercayaan antarnegara. ([UN Trade and Development \(UNCTAD\)](#))

Kawasan ini penting karena dua alasan mendasar. Pertama, ia adalah koridor ekonomi global. EIA mencatat bahwa pada 2023 sekitar 10 miliar barel minyak dan produk minyak serta 6,7 triliun kaki kubik gas alam melintasi Laut Cina Selatan. Dalam rujukan EIA sebelumnya, hampir sepertiga perdagangan minyak mentah dunia dan lebih dari separuh

perdagangan LNG global pernah melewati kawasan ini. UNCTAD juga menegaskan bahwa lebih dari 80 persen perdagangan dunia menurut volume diangkut melalui laut, sehingga setiap gangguan di chokepoints maritim akan memukul rantai pasok internasional. Kedua, kawasan ini sarat sengketa mengenai pulau, karang, elevasi surut, batas ZEE, dan landas kontinen. Dengan demikian, Laut Cina Selatan adalah ruang di mana ekonomi global dan hukum internasional diuji bersamaan. ([U.S. Energy Information Administration](#))

Di atas fondasi ekonomi itulah sengketa kedaulatan tumbuh makin keras. China mengklaim hampir seluruh kawasan melalui garis berbentuk U atau yang lazim disebut *nine-dash line*; sementara Brunei, Malaysia, Filipina, Vietnam, dan Taiwan juga memiliki klaim atas fitur-fitur tertentu. AMTI-CSIS mencatat lima pengklaim utama menempati hampir 70 karang dan pulau kecil yang disengketakan, dengan lebih dari 90 pos terbangun di atas fitur-fitur itu. Fakta tersebut menunjukkan bahwa sengketa tidak lagi bersifat simbolik, melainkan telah diwujudkan dalam kehadiran fisik, pembangunan, patroli, dan infrastruktur permanen. ([Asia Maritime Transparency Initiative](#))

Makalah ini berangkat dari pertanyaan pokok: mengapa Laut Cina Selatan terus menjadi titik panas geopolitik, padahal kerangka hukum internasional sudah tersedia melalui UNCLOS dan berbagai forum diplomatik regional? Jawaban singkatnya adalah bahwa hukum memang memberi norma, tetapi politik menentukan implementasi. Laut Cina Selatan memperlihatkan ketegangan klasik antara *law of the sea* dan *logic of power*: antara klaim legal dan kapasitas koersif, antara prinsip kebebasan navigasi dan praktik kontrol de facto, antara sentralitas ASEAN dan tekanan dari kompetisi China–Amerika Serikat. ([United Nations](#))

Laut Cina Selatan sebagai Jalur Dagang dan Koridor Geoekonomi

Secara geoekonomi, Laut Cina Selatan adalah arteri perdagangan Asia. Jalur ini menghubungkan Selat Malaka di barat daya dengan Selat Taiwan

di timur laut, dan karenanya menjadi penghubung utama antara pemasok energi di Timur Tengah dan Afrika dengan pasar industri besar di China, Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan. EIA menilai Laut Cina Selatan sebagai salah satu jalur perdagangan energi terpenting di dunia. Artinya, kawasan ini bukan sekadar ruang sengketa lokal Asia Tenggara, tetapi komponen sentral dalam stabilitas ekonomi Indo-Pasifik dan bahkan ekonomi global. ([U.S. Energy Information Administration](#))

Arti penting tersebut dapat dipahami melalui ilustrasi sederhana. Sebuah kapal tanker dari Teluk Persia menuju Jepang atau Korea Selatan kemungkinan besar akan melewati Selat Malaka lalu menembus Laut Cina Selatan. Jalur alternatif memang ada, tetapi umumnya lebih panjang, lebih mahal, dan lebih berisiko. Dalam logika manajemen rantai pasok, perubahan kecil dalam keamanan rute dapat menimbulkan perubahan besar dalam waktu pengiriman, biaya logistik, harga energi, dan ketahanan industri. Karena itu, stabilitas Laut Cina Selatan berhubungan langsung dengan inflasi energi, biaya manufaktur, dan keamanan pasokan bagi ekonomi Asia Timur. ([U.S. Energy Information Administration](#))

Di luar energi, Laut Cina Selatan juga penting bagi perdagangan kontainer, komoditas curah, dan hasil laut. Kawasan ini terintegrasi ke dalam jaringan pelabuhan besar Asia seperti Singapura, Hong Kong, Shenzhen, Kaohsiung, Manila, dan pelabuhan-pelabuhan Vietnam serta Malaysia. Bila ketegangan maritim meningkat, perusahaan pelayaran cenderung menyesuaikan rute, memperhitungkan biaya keamanan tambahan, bahkan mengubah jadwal persinggahan. Secara manajerial, ini berarti Laut Cina Selatan bukan hanya isu keamanan nasional, melainkan variabel strategis dalam keputusan logistik, investasi, dan pengelolaan risiko korporasi. ([UN Trade and Development \(UNCTAD\)](#))

Selain itu, kawasan ini mengandung sumber daya perikanan dan hidrokarbon yang memberi lapisan ekonomi tambahan pada sengketa. CFR mencatat estimasi sekitar 11 miliar barel minyak dan 190 triliun kaki kubik gas alam di kawasan sengketa, sementara sumber-sumber resmi energi AS

juga menilai Laut Cina Selatan kaya sumber daya minyak dan gas. Namun, yang tak kalah penting adalah stok ikan, karena bagi masyarakat pesisir Filipina, Vietnam, Malaysia, dan China selatan, Laut Cina Selatan adalah ruang hidup ekonomi sehari-hari, bukan sekadar peta geopolitik. Karena itu, benturan di laut sering kali melibatkan bukan hanya kapal angkatan laut, melainkan kapal ikan, penjaga pantai, dan milisi maritim. ([Council on Foreign Relations](#))

Dengan demikian, nilai strategis Laut Cina Selatan bersifat berlapis. Ia adalah jalur dagang, sumber energi, lumbung perikanan, arena simbol nasionalisme, dan sekaligus panggung unjuk kekuatan. Dalam teori strategi, wilayah seperti ini cenderung menjadi “ruang tidak tergantikan”: siapa pun yang dapat memengaruhi perilaku aktor lain di dalamnya akan memperoleh leverage ekonomi dan politik yang besar. Dari sinilah dapat dipahami mengapa perebutan kontrol di Laut Cina Selatan tidak pernah benar-benar surut. ([U.S. Energy Information Administration](#))

Akar Sengketa: Geografi, Sejarah, dan Para Pengklaim

Secara geografis, sengketa Laut Cina Selatan berpusat pada beberapa kelompok fitur utama, terutama Kepulauan Paracel, Kepulauan Spratly, Scarborough Shoal, dan Pratas/Dongsha. Namun, istilah “pulau” sering menyesatkan, sebab banyak fitur sebenarnya berupa karang, beting, atau elevasi surut yang nilai strategisnya justru timbul dari implikasi hukum dan militernya. Dalam sengketa maritim, satu karang kecil dapat menjadi dasar klaim ZEE atau setidaknya menjadi titik hadirnya penjaga pantai, radar, landasan pacu, atau pos logistik. Di sinilah geografi fisik berubah menjadi geografi kekuasaan. ([PCA Cases](#))

Pengklaim utama di Laut Cina Selatan adalah China, Taiwan, Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei. Reuters mencatat bahwa klaim luas China tumpang tindih dengan ZEE Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Vietnam, sementara AMTI menunjukkan bahwa lima pengklaim utama kini

menguasai hampir 70 fitur dan membangun lebih dari 90 pos. Ini penting karena sengketa telah bergerak dari tahap peta dan nota diplomatik menuju tahap pendudukan efektif, pembangunan fisik, dan normalisasi kehadiran di lapangan. Dalam hukum dan politik internasional, kehadiran terus-menerus sering kali dipakai untuk membangun argumen legitimasi, walau tidak selalu diakui lawan. ([Asia Maritime Transparency Initiative](#))

China mendasarkan posisinya pada klaim sejarah dan peta garis putus-putus yang mencakup sekitar 90 persen Laut Cina Selatan, walau rumusan dan justifikasi resminya berubah dalam berbagai periode. Beijing menolak anggapan bahwa klaim itu otomatis berarti kedaulatan atas seluruh perairan, tetapi tetap mempertahankan apa yang disebutnya sebagai hak dan kepentingan maritim historis. Di sisi lain, negara-negara Asia Tenggara menegaskan bahwa klaim maritim harus tunduk pada rezim hukum UNCLOS, bukan pada peta historis unilateral. Pertentangan inilah yang membuat sengketa berlangsung lama: satu pihak menonjolkan sejarah dan kontrol, pihak lain menuntut pembatasan hak berdasarkan hukum laut modern. ([Chinese Foreign Ministry](#))

Filipina, misalnya, memandang banyak insiden sebagai pelanggaran terhadap hak-haknya di dalam ZEE. Reuters pada 16 Maret 2026 mencatat bahwa Manila kembali menolak pernyataan Beijing yang dianggap mengafirmasi klaim luas atas Laut Cina Selatan dan menegaskan kedaulatan Filipina atas Scarborough Shoal serta fitur-fitur yang didudukinya di Spratly. Dalam narasi Filipina, sengketa bukan semata konflik simbolik, tetapi persoalan akses nelayan, misi logistik ke pos-pos terdepan, dan perlindungan terhadap personel negara. Karena itu, Laut Cina Selatan bagi Manila adalah isu kedaulatan sekaligus isu ketahanan domestik. ([Reuters](#))

Vietnam memegang posisi serupa dalam hal penegasan hak dan pendudukan fitur-fitur di Spratly. Menariknya, dinamika terkini menunjukkan bahwa bukan hanya China yang melakukan reklamasi dan pembangunan. Reuters melaporkan pada Agustus 2025 bahwa Vietnam

memperluas pekerjaan reklamasi secara signifikan pada sejumlah fitur di Spratly, dan dalam skala tertentu berpotensi mendekati atau bahkan melampaui pembangunan lahan buatan China di kawasan tersebut. Ini menunjukkan bahwa logika kompetisi di Laut Cina Selatan tidak lagi bersifat satu arah; negara-negara pengklaim lain juga menyesuaikan diri terhadap realitas lapangan. ([Reuters](#))

Malaysia dan Brunei cenderung lebih berhati-hati dalam retorika, tetapi kepentingan mereka nyata, terutama terkait ZEE, sumber daya bawah laut, dan kegiatan eksplorasi. Indonesia secara resmi menyatakan diri bukan pihak pengklaim di Laut Cina Selatan, namun menolak mentah-mentah klaim China yang memasuki kawasan ZEE Indonesia di Laut Natuna Utara. Karena itu, Indonesia bukan pengklaim pulau, tetapi tetap pemangku kepentingan strategis yang sangat penting. Posisi ini mencerminkan kompleksitas sengketa: sebuah negara bisa tidak mengklaim kepulauan sengketa, tetapi tetap terlibat karena hak maritimnya terdampak. ([Reuters](#))

Kerangka Hukum: UNCLOS, DOC, dan Putusan Arbitrase 2016

Kerangka hukum utama sengketa Laut Cina Selatan adalah United Nations Convention on the Law of the Sea 1982. ASEAN pada 2025 dan 2026 kembali menegaskan bahwa UNCLOS adalah landasan legal bagi seluruh aktivitas di laut dan menjadi rujukan bagi penyelesaian damai sengketa di Laut Cina Selatan. Bagi negara-negara Asia Tenggara, nilai penting UNCLOS terletak pada kemampuannya mengubah sengketa dari arena narasi historis yang kabur menjadi arena hak dan kewajiban yang lebih terukur: laut teritorial, zona tambahan, ZEE, dan landas kontinen.

Dalam rezim UNCLOS, ZEE memberi negara pantai hak berdaulat untuk eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber daya alam hingga 200 mil laut dari garis pangkal, meski bukan berarti kedaulatan penuh sebagaimana laut teritorial. Sementara itu, elevasi surut adalah fitur yang hanya muncul saat air surut dan tenggelam saat pasang; fitur seperti

ini tidak secara otomatis menghasilkan zona maritim seperti pulau. UNCLOS juga membedakan pulau dari batu: batu yang tidak dapat menopang hunian manusia atau kehidupan ekonomi sendiri tidak berhak atas ZEE atau landas kontinen. Perbedaan inilah yang sangat krusial dalam sengketa Laut Cina Selatan. ([United Nations](#))

Secara politik-diplomatik, kawasan ini juga diatur oleh **Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea** (DOC) tahun 2002. Deklarasi ini bukan penyelesaian final, tetapi berfungsi sebagai komitmen normatif untuk menahan diri, menghindari tindakan yang memperumit situasi, dan mendorong lahirnya Code of Conduct (COC). Masalahnya, DOC sendiri tidak cukup kuat untuk mencegah pembangunan fisik, patroli koersif, atau taktik *grey zone*. Karena itu, selama dua dekade lebih, kawasan ini hidup dalam paradoks: semua pihak berbicara tentang penahanan diri, tetapi aktivitas yang menimbulkan eskalasi terus berlangsung. ([ASEAN](#))

Titik hukum paling penting dalam sengketa modern adalah putusan arbitrase 12 Juli 2016 dalam kasus Filipina melawan China. Menurut rilis resmi PCA, tribunal menyimpulkan bahwa tidak ada dasar hukum bagi China untuk mengklaim hak historis atas sumber daya di dalam *nine-dash line* sejauh klaim tersebut melampaui hak yang diberikan UNCLOS. Tribunal juga menilai status sejumlah fitur di Laut Cina Selatan dan memeriksa legalitas tindakan tertentu yang dipersoalkan Filipina. Putusan ini menjadi tonggak karena memindahkan diskusi dari bahasa sejarah ke bahasa legal positivistik. ([PCA Cases](#))

Dari sudut pandang negara-negara pendukung putusan itu, arti putusan 2016 sangat besar. Ia menegaskan bahwa klaim maritim tidak dapat didasarkan secara sepihak pada sejarah yang tidak kompatibel dengan rezim UNCLOS. Namun, dari sudut pandang Beijing, arbitrase tersebut dianggap "ilegal, batal demi hukum, dan tidak mengikat." Dalam pernyataan resmi 12 Juli 2025, Kementerian Luar Negeri China kembali menegaskan penolakan totalnya terhadap putusan itu dan menyatakan kedaulatan serta hak maritim China tidak terpengaruh oleh putusan

arbitrase. Dengan demikian, benturan hukum di Laut Cina Selatan bukan antara ada atau tidak adanya norma, melainkan antara legitimasi hukum dan penerimaan politik atas norma tersebut. ([Chinese Foreign Ministry](#))

Di sini terlihat keterbatasan hukum internasional. Putusan arbitrase dapat memberi kejelasan normatif, tetapi tidak otomatis mengubah perilaku negara yang memiliki kapasitas koersif besar dan menolak yurisdiksi atau hasil putusan. Dalam bahasa manajemen konflik, 2016 menghasilkan “kejelasan aturan” tetapi belum menghasilkan “kepatuhan perilaku.” Karena itu, hukum di Laut Cina Selatan berfungsi penting sebagai sumber legitimasi, namun belum cukup sebagai instrumen pemaksa. ([PCA Cases](#))

Politik Keseimbangan: Dari ASEAN hingga Kekuatan Besar

Mengapa Laut Cina Selatan sulit diselesaikan? Salah satu jawabannya ialah karena sengketa ini bukan lagi semata urusan para pengklaim, melainkan bagian dari politik keseimbangan di Indo-Pasifik. China memandang kawasan ini sebagai ruang strategis yang dekat dengan garis pertahanan maritimnya. Bagi Beijing, kehadiran yang kuat di Laut Cina Selatan berkaitan dengan keamanan jalur energi, pencegahan pengepungan strategis, dan kapasitas untuk memproyeksikan kekuatan dari “rantai pulau pertama.” Karena itu, pendekatan China tidak hanya legal-diplomatik, tetapi juga operasional melalui penjaga pantai, milisi maritim, patroli, dan pembangunan fasilitas. ([Asia Maritime Transparency Initiative](#))

AMTI melaporkan bahwa pada 2025 rata-rata harian kapal milisi maritim China mencapai 241 unit, naik dari 232 pada 2024 dan merupakan angka tertinggi yang pernah dicatat dalam dataset mereka. Kehadiran seperti ini penting bukan hanya secara kuantitatif, tetapi juga secara strategis. Milisi maritim memungkinkan Beijing menekan lawan di bawah ambang perang terbuka. Dalam teori keamanan, inilah praktik *grey zone*: menggunakan tekanan terus-menerus, ambigu, dan terkalibrasi agar lawan kehilangan

ruang manuver, namun tanpa memicu respons militer penuh dari pihak lain. ([Asia Maritime Transparency Initiative](#))

Di sisi lain, Filipina semakin menyeimbangkan diri melalui penguatan hubungan dengan mitra eksternal. Reuters mencatat pada 27 Maret 2026 bahwa Filipina dan Prancis menandatangani *visiting forces agreement*, menambah daftar mitra pertahanan Manila bersama Amerika Serikat, Australia, Jepang, dan Selandia Baru. Langkah semacam ini menunjukkan pola *external balancing*: negara yang merasa tertekan oleh pengklaim yang lebih kuat berusaha memperbesar daya tawar melalui jejaring pertahanan dan latihan bersama. Laut Cina Selatan, karenanya, menjadi ruang di mana aliansi, akses militer, dan interoperabilitas ikut dipertaruhkan. ([Reuters](#))

Namun politik keseimbangan di Laut Cina Selatan tidak identik dengan blok-blok keras. Banyak negara ASEAN berusaha menjaga keseimbangan ganda: menolak dominasi sepihak, tetapi juga menghindari keterjeratan total dalam rivalitas China–Amerika Serikat. Itulah sebabnya sentralitas ASEAN tetap penting. Pada KTT ASEAN ke-46 tahun 2025 dan Retreat Menlu ASEAN 29 Januari 2026, ASEAN kembali menekankan pentingnya perdamaian, kebebasan navigasi, penyelesaian damai, penahanan diri, dan penghormatan pada UNCLOS. Bahasa ini menunjukkan strategi khas ASEAN: menahan eskalasi, menjaga ruang diplomasi, dan mencegah kawasan terbelah menjadi kubu-kubu permanen.

Masalahnya, sentralitas ASEAN selalu diuji oleh perbedaan kepentingan internal. Negara-negara pengklaim cenderung menginginkan bahasa yang lebih tegas terhadap pelanggaran di lapangan, sedangkan negara-negara non-pengklaim sering lebih berhati-hati agar tidak merusak hubungan ekonomi dengan China. Akibatnya, ASEAN kuat sebagai forum normatif, tetapi sering kurang tegas sebagai aktor penyeimbang keras. Dalam logika organisasi regional, ini adalah dilema klasik antara konsensus dan efektivitas. Semakin tinggi tuntutan konsensus, semakin terbatas kemampuan organisasi mengambil posisi keras.

Code of Conduct dan Keterbatasan Diplomasi Regional

Gagasan Code of Conduct sebenarnya menjanjikan. Jika berhasil disusun secara efektif, COC dapat menjadi aturan main yang lebih operasional daripada DOC, misalnya tentang komunikasi antarkapal, pencegahan tabrakan, larangan tindakan koersif tertentu, dan mekanisme penanganan insiden. ASEAN pada 2025 menegaskan dukungannya bagi percepatan penyelesaian COC yang efektif dan substantif, selaras dengan hukum internasional dan UNCLOS. Pada KTT ASEAN ke-47 tahun 2025 bahkan disebutkan adanya penyelesaian pembacaan ketiga terhadap *Single Draft Negotiating Text*. Ini menunjukkan proses negosiasi berjalan, meski lambat.

Pada awal 2026, Filipina sebagai Ketua ASEAN berupaya mendorong penyelesaian COC dalam tahun yang sama dan menekankan bahwa dokumen tersebut harus berbasis UNCLOS serta bersifat mengikat secara hukum. Reuters pada 22 Januari 2026 dan 29 Januari 2026 menegaskan posisi ini. Pernyataan tersebut penting karena memperlihatkan bahwa perdebatan utama bukan lagi sekadar “apakah COC perlu,” melainkan “COC seperti apa yang akan diterima semua pihak.” Jika COC hanya menjadi dokumen longgar tanpa rujukan tegas ke UNCLOS dan tanpa mekanisme kepatuhan, maka ia berisiko menjadi simbol diplomasi tanpa daya kendali nyata. ([Reuters](#))

Di sinilah problem utamanya. Semakin efektif suatu COC, semakin besar kemungkinan ia dianggap membatasi ruang gerak operasional aktor yang paling kuat. Sebaliknya, semakin longgar suatu COC, semakin besar kemungkinan ia diterima semua pihak, tetapi makin kecil dampak praktisnya. Dengan kata lain, diplomasi regional terjebak pada dilema antara inklusivitas dan efektivitas. Dari sudut teori negosiasi, Laut Cina Selatan memperlihatkan bahwa rezim keamanan kawasan sering kali lahir bukan dari kesepakatan ideal, melainkan dari kompromi yang sengaja dibatasi agar tetap bisa diterima para pihak.

Walau demikian, diplomasi tetap penting. Faktanya, pada 30 Januari 2026 pejabat senior ASEAN dan China kembali bertemu di Cebu untuk meninjau

implementasi DOC dan pembahasan COC. Ini menunjukkan bahwa di tengah insiden berulang, kanal dialog tidak terputus. Dalam studi konflik, keberlanjutan kanal komunikasi sendiri adalah aset strategis karena mencegah salah baca, memberi ruang *de-escalation*, dan menjaga kemungkinan kerja sama terbatas di bidang keselamatan laut, riset, atau perlindungan lingkungan. ([ASEAN](#))

Dinamika Terkini 2025–2026: Eskalasi, Adaptasi, dan Diplomasi

Periode 2025–awal 2026 menunjukkan bahwa Laut Cina Selatan tetap berada dalam fase kompetisi intensif. Pada 29 Maret 2026, Reuters melaporkan bahwa China melakukan patroli laut, udara, dan penjaga pantai di sekitar Scarborough Shoal. Patroli ini dilakukan hanya sehari setelah Manila dan Beijing kembali membuka perundingan tingkat tinggi mengenai Laut Cina Selatan dan kerja sama minyak-gas. Di sini tampak pola khas kawasan ini: dialog dan demonstrasi kekuatan berjalan beriringan, bukan saling menggantikan. ([Reuters](#))

Perundingan Manila–Beijing pada 28 Maret 2026 sendiri menarik karena menyingkap keterkaitan antara sengketa maritim dan keamanan energi. Dalam konteks gangguan pasokan akibat konflik Timur Tengah, kedua pihak membahas kemungkinan langkah awal kerja sama minyak dan gas, di samping isu energi, pupuk, pertanian, serta komunikasi penjaga pantai. Ini menunjukkan bahwa bahkan di tengah sengketa, kepentingan ekonomi dapat membuka ruang *functional cooperation*. Namun ruang itu rapuh, karena setiap insiden di laut dapat langsung merusak kepercayaan yang baru dibangun. ([Reuters](#))

Pada saat yang sama, perang narasi tetap keras. Reuters pada 16 Maret 2026 mencatat penolakan Filipina terhadap pernyataan yang dianggap mengafirmasi klaim Beijing atas hampir seluruh Laut Cina Selatan, khususnya dalam kaitan dengan Scarborough Shoal. Manila menegaskan bahwa klaim teritorial dan maritim harus tunduk pada prosedur hukum

internasional, bukan pada pernyataan sepihak. Dari sudut komunikasi strategis, perang kata-kata seperti ini bukan sekadar propaganda, melainkan bagian dari pertarungan legitimasi: siapa yang tampak paling taat hukum, paling rasional, dan paling sah di mata komunitas internasional. ([Reuters](#))

Di pihak lain, dinamika fisik kawasan juga berubah. Reuters pada Agustus 2025 melaporkan bahwa Vietnam mempercepat reklamasi di sejumlah fitur Spratly, sementara AMTI menunjukkan peningkatan kehadiran milisi maritim China sepanjang 2025. Ini berarti bukan hanya China yang menyesuaikan posisi di lapangan; aktor lain juga merespons dengan cara masing-masing. Secara strategis, hal ini mengurangi peluang terjadinya dominasi tunggal yang sepenuhnya tak tertandingi, tetapi sekaligus meningkatkan risiko salah hitung dan *security dilemma*: satu pihak membangun untuk bertahan, pihak lain memandangnya sebagai ancaman. ([Reuters](#))

ASEAN sendiri memasuki 2026 dengan beban ekspektasi yang tinggi. Filipina sebagai ketua berusaha memberi momentum baru, sementara Malaysia pada 2025 sudah menekankan percepatan COC yang efektif dan substantif. Akan tetapi, realitas lapangan memperlihatkan bahwa institusi regional berjalan lebih lambat dibanding dinamika operasional di laut. Dengan kata lain, kapal-kapal bergerak lebih cepat daripada diplomasi. Itulah sebabnya politik keseimbangan di Laut Cina Selatan terus berlangsung dalam ruang hibrida: setengah legal, setengah koersif; setengah multilateral, setengah bilateral.

Indonesia, Natuna Utara, dan Posisi “Non-Claimant but Affected”

Bagi Indonesia, Laut Cina Selatan adalah isu yang harus dibaca dengan presisi. Secara resmi Indonesia bukan negara pengklaim atas pulau-pulau sengketa utama seperti Spratly atau Paracel. Namun Indonesia menegaskan bahwa tidak ada klaim tumpang tindih dengan China di Laut

Natuna Utara, dan bahwa klaim maritim China tidak memiliki dasar hukum internasional. Pada November 2024, Reuters melaporkan bahwa Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan kembali posisi tersebut meskipun muncul kontroversi atas bahasa “overlapping claims” dalam pernyataan bersama Indonesia–China. ([Reuters](#))

Posisi Indonesia ini penting secara konseptual. Ia menunjukkan bahwa ada perbedaan antara sengketa kepemilikan fitur dan sengketa yurisdiksi maritim. Indonesia tidak mengklaim fitur yang disengketakan, tetapi berkeras mempertahankan hak berdaulatnya atas ZEE. Dengan demikian, kepentingan Indonesia bukanlah menjadi pihak dalam perebutan pulau, melainkan menjaga integritas rezim UNCLOS dan mencegah normalisasi klaim historis yang dapat menggerus hak maritimnya. Dalam hal ini, kepentingan nasional Indonesia bertemu dengan kepentingan normatif yang lebih luas: mempertahankan hukum laut sebagai fondasi tata kelola maritim kawasan. ([Reuters](#))

Dari perspektif politik luar negeri, posisi Indonesia cenderung menggabungkan tiga hal sekaligus: diplomasi, penegasan hukum, dan penguatan kapasitas maritim. Pendekatan ini konsisten dengan peran Indonesia sebagai pendukung sentralitas ASEAN dan stabilitas kawasan. Indonesia berkepentingan agar Laut Cina Selatan tidak berubah menjadi arena militerisasi permanen, sebab dampaknya akan langsung terasa pada perdagangan regional, keamanan energi, dan kredibilitas ASEAN. Oleh karena itu, bagi Indonesia, menjaga Laut Cina Selatan berarti menjaga ketertiban berbasis aturan tanpa harus terjebak menjadi pihak dalam blok kekuatan tertentu. ([Reuters](#))

Dalam kerangka yang lebih luas, Indonesia memiliki modal diplomatik untuk mendorong dua agenda. Pertama, memastikan setiap pembahasan COC tetap berbasis UNCLOS. Kedua, memperkuat langkah-langkah pencegahan insiden dan komunikasi maritim praktis. Dalam bahasa manajemen konflik, Indonesia berpotensi menjadi *stabilizer*: bukan aktor yang mendominasi, tetapi aktor yang membantu menurunkan temperatur

kawasan melalui kombinasi legitimasi normatif dan diplomasi tengah.
([Reuters](#))

Politik Keseimbangan: Pembacaan Analitis

Istilah “politik keseimbangan” dalam konteks Laut Cina Selatan tidak boleh dipahami terlalu sempit sebagai keseimbangan militer tradisional. Yang berlangsung di kawasan ini adalah keseimbangan bertingkat. Ada keseimbangan hukum, ketika negara-negara kecil-menengah menggunakan UNCLOS dan arbitrase untuk memperkuat legitimasi mereka. Ada keseimbangan diplomatik, ketika ASEAN berusaha menjaga ruang multilateral agar sengketa tidak sepenuhnya dibawa ke logika bilateral yang menguntungkan pihak terkuat. Ada pula keseimbangan strategis, ketika jejaring keamanan dan latihan bersama dipakai untuk menghambat dominasi sepihak. ([PCA Cases](#))

China tampaknya mengandalkan kombinasi kehadiran fisik, tekanan *grey zone*, penolakan terhadap putusan yang dianggap merugikan, dan negosiasi selektif. Sebaliknya, negara-negara pengklaim Asia Tenggara cenderung menggabungkan hukum internasional, forum ASEAN, dan kemitraan eksternal. Hasilnya bukan keseimbangan stabil dalam arti klasik, melainkan *competitive equilibrium* yang rapuh: tidak ada pihak yang dapat memaksakan penyelesaian total, tetapi juga tidak ada penyelesaian final yang benar-benar diterima semua. Itulah sebabnya Laut Cina Selatan terus berada dalam status “damai yang tegang.” ([Chinese Foreign Ministry](#))

Dalam kerangka itu, *grey zone tactics* menjadi sangat efektif. Taktik semacam ini tidak menyeberangi ambang perang, tetapi cukup untuk mengubah fakta di lapangan sedikit demi sedikit. Kapal penjaga pantai, kapal ikan bersenjata samar, radar, landasan kecil, atau patroli “rutin” dapat membangun persepsi penguasaan tanpa deklarasi perang. Secara manajerial, ini serupa strategi inkremental: perubahan kecil, terus-menerus, dan terukur sering kali lebih efektif daripada satu langkah besar yang

memicu resistensi keras. Laut Cina Selatan adalah salah satu laboratorium utama strategi inkremental tersebut. ([Asia Maritime Transparency Initiative](#))

Namun strategi seperti ini juga menimbulkan biaya. Semakin tinggi tekanan *grey zone*, semakin besar kecenderungan lawan mencari dukungan eksternal, memperkuat pertahanan, dan menginternasionalisasi isu. Itu tampak dari perluasan jaringan pertahanan Filipina dan dorongan agar COC berbasis hukum internasional. Dengan demikian, tindakan koersif yang dimaksudkan untuk memperbesar kontrol jangka pendek justru dapat memperkuat koalisi penyeimbang dalam jangka menengah. Inilah paradoks utama Laut Cina Selatan: setiap upaya dominasi memicu pembalasan dalam bentuk hukum, diplomasi, atau aliansi. ([Reuters](#))

Arah Kebijakan dan Jalan Keluar

Jalan keluar untuk Laut Cina Selatan tidak realistis bila dibayangkan sebagai penyelesaian final yang cepat. Sengketa ini telah terlalu lama terhubung dengan identitas nasional, strategi militer, dan simbol legitimasi rezim. Yang lebih realistis adalah membangun stabilitas bertahap melalui beberapa lapis kebijakan. Pertama, penguatan pencegahan insiden di laut: jalur komunikasi langsung, protokol pertemuan antarkapal, larangan manuver berbahaya, dan pelaporan insiden yang transparan. Kedua, percepatan COC yang benar-benar operasional dan berbasis UNCLOS. Ketiga, pemisahan sementara antara sengketa kedaulatan dan bidang kerja sama fungsional seperti keselamatan navigasi, riset oseanografi, atau konservasi laut.

Bagi ASEAN, tantangan utamanya adalah memastikan sentralitas tidak berhenti pada formula diplomatik. ASEAN perlu menunjukkan bahwa sentralitas berarti kemampuan mengatur agenda, menetapkan standar normatif, dan menciptakan mekanisme pengelolaan krisis. Jika tidak, sentralitas akan menjadi slogan yang terus diucapkan tetapi makin terpisah dari kenyataan di laut. Fakta bahwa ASEAN pada 2025 dan 2026 terus

merujuk pada UNCLOS, penahanan diri, dan COC adalah langkah penting, tetapi langkah itu harus diterjemahkan menjadi perangkat yang lebih konkret.

Bagi negara-negara pengklaim, penting untuk menjaga agar politik keseimbangan tidak berubah menjadi spiral eskalasi. Deterensi memang diperlukan, tetapi tanpa kanal komunikasi, deterensi mudah berubah menjadi salah kalkulasi. Pengalaman berbagai kawasan menunjukkan bahwa konflik sering meledak bukan karena keputusan perang yang disengaja, melainkan karena rangkaian insiden yang tak dikelola. Laut Cina Selatan sangat rentan terhadap pola itu karena padat kapal, padat klaim, dan padat simbol politik. ([Reuters](#))

Bagi Indonesia, prioritas strategis sebaiknya meliputi empat hal: mempertahankan posisi hukum berbasis UNCLOS; memperkuat pengawasan dan kapasitas maritim di Natuna Utara; aktif mendorong COC yang substantif; dan tetap memainkan peran sebagai penengah normatif di ASEAN. Dalam jangka panjang, kepentingan Indonesia tidak hanya terletak pada perlindungan ZEE, tetapi juga pada terjaganya laut Asia Tenggara sebagai ruang dagang yang aman, terbuka, dan tidak didominasi oleh logika koersif sepihak. ([Reuters](#))

Penutup

Laut Cina Selatan adalah cermin dunia yang sedang bergeser. Di satu sisi, kawasan ini menunjukkan pentingnya hukum internasional, khususnya UNCLOS, sebagai bahasa bersama untuk mengatur hak dan kewajiban maritim. Di sisi lain, kawasan ini juga memperlihatkan bahwa norma tanpa penerimaan politik dan kapasitas penegakan akan selalu berbenturan dengan kekuatan material. Karena itu, Laut Cina Selatan adalah arena tempat hukum, kekuasaan, ekonomi, dan identitas nasional bernegosiasi setiap hari. ([United Nations](#))

Sebagai jalur dagang dan energi, Laut Cina Selatan terlalu penting untuk dibiarkan jatuh ke dalam instabilitas berkepanjangan. Sebagai ruang sengketa, ia terlalu kompleks untuk diselesaikan dengan retorika sederhana. Dan sebagai arena politik keseimbangan, ia terlalu berbahaya bila hanya dibaca sebagai permainan menang-kalah. Masa depan kawasan ini akan sangat ditentukan oleh apakah para aktor dapat menerima satu kenyataan mendasar: tidak ada stabilitas jangka panjang tanpa hukum, tetapi juga tidak ada hukum yang efektif tanpa desain politik yang realistis. Inilah pelajaran utama Laut Cina Selatan bagi Asia dan bagi dunia. ([U.S. Energy Information Administration](#))

Glosarium

ASEAN

Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara yang berperan sebagai forum utama diplomasi regional di Asia Tenggara.

Code of Conduct (COC)

Rancangan aturan perilaku yang sedang dinegosiasikan ASEAN dan China untuk mengurangi risiko konflik di Laut Cina Selatan.

Declaration on the Conduct of Parties (DOC)

Deklarasi tahun 2002 yang menekankan penahanan diri dan penyelesaian damai sengketa di Laut Cina Selatan. ([ASEAN](#))

Exclusive Economic Zone (ZEE/EEZ)

Zona hingga 200 mil laut dari garis pangkal, tempat negara pantai memiliki hak berdaulat atas sumber daya alam. ([United Nations](#))

Freedom of Navigation

Prinsip bahwa kapal dapat melintas di laut sesuai hukum internasional tanpa hambatan yang melanggar aturan.

Grey Zone

Taktik tekanan di bawah ambang perang terbuka, misalnya patroli agresif, milisi maritim, atau penghalangan logistik. ([Asia Maritime Transparency Initiative](#))

Landas Kontinen

Dasar laut dan tanah di bawahnya yang dapat menjadi dasar hak negara pantai atas sumber daya tertentu menurut UNCLOS.

Milisi Maritim

Kapal sipil atau semi-sipil yang beroperasi mendukung kepentingan strategis negara di laut, sering dengan karakter ambigu. ([Asia Maritime Transparency Initiative](#))

Nine-Dash Line

Garis putus-putus pada peta China yang dipakai untuk menandai klaim historisnya di Laut Cina Selatan. ([Reuters](#))

PCA (Permanent Court of Arbitration)

Lembaga yang menjadi registri arbitrase Filipina v. China dalam perkara Laut Cina Selatan. ([PCA-CPA](#))

Scarborough Shoal

Fitur maritim strategis di dalam ZEE Filipina menurut Manila, tetapi juga diklaim dan dikontrol secara efektif oleh China. ([Reuters](#))

Spratly Islands

Kelompok fitur paling kompleks dan paling diperebutkan di Laut Cina Selatan. ([Reuters](#))

UNCLOS

Konvensi Hukum Laut PBB 1982 yang menjadi kerangka hukum utama bagi hak maritim dan penyelesaian sengketa laut.

Zona tambahan (contiguous zone)

Zona di luar laut teritorial tempat negara pantai memiliki kewenangan terbatas untuk penegakan hukum tertentu.

Elevasi surut (low-tide elevation)

Fitur yang muncul saat surut tetapi tenggelam saat pasang; tidak otomatis menghasilkan zona maritim seperti pulau. ([United Nations](#))

Politik keseimbangan (balance politics)

Upaya aktor-aktor negara untuk mencegah dominasi tunggal melalui kombinasi hukum, diplomasi, aliansi, dan peningkatan kapasitas.

Referensi (APA 7)

Association of Southeast Asian Nations. (2002). *Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea*. ASEAN.

Association of Southeast Asian Nations. (2019). *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific*. ASEAN. ([ASEAN](#))

Association of Southeast Asian Nations. (2025, May 26). *Chairman's Statement of the 46th ASEAN Summit*. ASEAN.

Association of Southeast Asian Nations. (2025, November 4). *Chairman's Statement of the 47th ASEAN Summit*. ASEAN. ([ASEAN](#))

Association of Southeast Asian Nations. (2026, January 29). *Press Statement by the Chair of the ASEAN Foreign Ministers' Retreat*. ASEAN. ([ASEAN](#))

Association of Southeast Asian Nations. (2026, January 30). *The 25th ASEAN-China Senior Officials' Meeting on the Implementation of the Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea convenes in Cebu, the Philippines*. ASEAN. ([ASEAN](#))

Asia Maritime Transparency Initiative. (2026, February 23). *All Together Now: China's Militia in 2025*. Center for Strategic and International Studies. ([Asia Maritime Transparency Initiative](#))

Asia Maritime Transparency Initiative. (n.d.). *Island Tracker*. Center for Strategic and International Studies. ([Asia Maritime Transparency Initiative](#))

Council on Foreign Relations. (2024, September 17). *Territorial disputes in the South China Sea*. CFR. ([Council on Foreign Relations](#))

Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China. (2025, July 12). *Foreign Ministry Spokesperson's Remarks on the Philippines' Statement on the Ninth Anniversary of the "2016 Arbitral Award on the South China Sea"*. ([Chinese Foreign Ministry](#))

Permanent Court of Arbitration. (2016, July 12). *Press release: The South China Sea Arbitration (The Republic of the Philippines v. The People's Republic of China)*. ([PCA-CPA](#))

Permanent Court of Arbitration. (2016, July 12). *The South China Sea Arbitration Award*. ([PCA Cases](#))

Reuters. (2024, November 11). *Indonesia says it has no overlapping South China Sea claims with China, despite deal*. ([Reuters](#))

Reuters. (2025, August 22). *Vietnam island building in Spratlys may soon surpass China's, report says*. ([Reuters](#))

Reuters. (2026, January 22). *Philippines will insist South China Sea code is based on international law, foreign minister says*. ([Reuters](#))

Reuters. (2026, January 29). *Southeast Asian bloc faces challenges from Myanmar to South China Sea*. ([Reuters](#))

Reuters. (2026, March 16). *Philippines rejects Beijing's claim to sovereignty over entire South China Sea*. ([Reuters](#))

Reuters. (2026, March 27). *Philippines, France sign military pact amid South China Sea tensions*. ([Reuters](#))

Reuters. (2026, March 28). *Manila, Beijing resume talks on South China Sea, energy security*. ([Reuters](#))

Reuters. (2026, March 29). *China conducts patrol around disputed South China Sea shoal*. ([Reuters](#))

United Nations. (1982). *United Nations Convention on the Law of the Sea*. United Nations. ([United Nations](#))

U.S. Energy Information Administration. (2013, April 4). *The South China Sea is an important world energy trade route*. EIA. ([U.S. Energy Information Administration](#))

U.S. Energy Information Administration. (n.d.). *South China Sea*. EIA. ([U.S. Energy Information Administration](#))

United Nations Conference on Trade and Development. (2024). *Review of Maritime Transport 2024*. UNCTAD. ([UN Trade and Development \(UNCTAD\)](#))

[Reuters](#)

[Reuters](#)

[Reuters](#)

[Wall Street Journal](#)

Copilot for this article: ChatGPT 5.4. Thinking (2026). Access date: 4 April 2026. Author's account ([Rudy C Tarumingkeng](#))

<https://chatgpt.com/c/69d0995b-9420-83a1-9aa9-b133197c3734>